

**RUMUSAN HASIL  
SIMPOSIUM NASIONAL KEPENDUDUKAN 2024**

**TEMA:  
Transformasi Kebijakan Kependudukan  
Menuju Indonesia Emas 2045**

**Surakarta, 9 Oktober 2024**

---

Simposium Nasional Kependudukan 2024 telah terlaksana pada tanggal 9 Oktober 2024 di Gedung UNS Tower, Universitas Sebelas Maret melalui daring dan luring. Seluruh rangkaian kegiatan telah bersama-sama diikuti oleh peserta yang berfokus pada pengembangan strategi dan rekomendasi untuk pencapaian target stunting, kemiskinan ekstrem, SDGs 2030, dan pengimplementasian grand desain pembangunan kependudukan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan materi paparan dari para narasumber serta hasil diskusi selama kegiatan berlangsung, maka dapat dirumuskan hasil Simposium Nasional Kependudukan 2024 sebagai berikut:

1. Transformasi kebijakan kependudukan menuju Indonesia Emas 2045 merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Transformasi ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek demografi, tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan yang inklusif, inovatif, dan berbasis teknologi.
2. mempertimbangkan megatrend kependudukan nasional dan analisis situasi kondisi capaian kependudukan maka arah kebijakan juga harus mencakup:
  - 1) mempertahankan tingkat kelahiran pada angka *replacement level* secara nasional;
  - 2) mengurangi disparitas capaian kependudukan antar wilayah;
  - 3) meningkatkan kesehatan reproduksi dengan mengurangi kehamilan berisiko;
  - 4) meningkatkan kualitas penduduk menuju tercapainya ketahanan demografi;
  - 5) pemanfaatan bonus demografi;
  - 6) mengantisipasi masuknya era penuaan penduduk dengan berbagai kebijakan pro lansia;
  - 7) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
  - 8) meningkatkan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan, dan
  - 9) meningkatkan partisipasi masyarakat melaporkan peristiwa kependudukan.
3. Dalam optimalisasi peran daerah dalam pembangunan kependudukan menuju indonesia emas 2045 diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dalam:
  - a. Otonomi daerah berorientasi pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan daerah;
  - b. Kewenangan: kependudukan urusan wajib non pelayanan dasar, dan transmigrasi urusan pilihan menjadi urusan wajib pelayanan dasar;
  - c. Keberhasilan urusan kependudukan menjadi tanggung jawab kepala daerah;

- d. Peningkatan akurasi, cakupan, dan dokumen kependudukan dukcapil;
  - e. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan lapangan kerja;
  - f. Ekstensifikasi dan intensifikasi PAD.
4. Ekonomi dan kewirausahaan memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
  5. Grand Design Pembangunan Kependudukan menyebutkan bahwa peningkatan kualitas penduduk di bidang ekonomi dilakukan melalui peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran dan pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.
  6. Rekomendasi untuk peningkatan ekonomi dan kewirausahaan untuk mendukung Indonesia Emas 2045 yaitu (1) sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat; (2) penguatan ekosistem kewirausahaan; (3) penguatan infrastruktur yang mendukung, termasuk infrastruktur digital; (4) pendidikan dan pelatihan berkelanjutan melalui pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) yang sesuai dengan dunia usaha dan industry; (5) regulasi yang mendukung dan berkeadilan; (6) peningkatan inovasi dan riset; (7) inkubasi bisnis; (8) penguatan ekonomi local.
  7. Ekosistem Sekolah Peternak Rakyat yang dikembangkan IPB, apabila, didorong dengan baik, maka akan dapat mendorong perubahan iklim. Selain itu, IPB telah mendukung petani di sekitar kampus sehingga dapat menyuplai swalayan dan supermarket di sekitar kampus dan IPB mendorong petani desa untuk bisa ekspor produk pertanian ke luar negeri. Jika pendapatan petani tinggi, maka akan meningkatkan kualitas SDM dan jika gizi kita baik maka kita akan menjadi generasi yang berkualitas.
  8. Stunting masih menjadi program prioritas nasional. Anak-anak yang saat ini berusia balita, akan menjadi angkatan kerja di tahun 2045. Jika saat ini mampu menghapus stunting, maka akan menjadi angkatan kerja yang berkualitas dan menjadi modal dasar untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
  9. Pertumbuhan *Gross Domestic Regional Product* (GDRP) sektor primer akan berkontribusi pada peningkatan prevalensi stunting, sementara pertumbuhan GDRP sektor sekunder akan berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting di Indonesia.
  10. Arah kebijakan dan strategi Badan Gizi Nasional 2025-2029 untuk mewujudkan manusia Indonesia berkualitas, adalah:
    - 1) Peningkatan akses terhadap pangan sehat;
    - 2) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran konsumsi pangan sehat (*healthy food*);
    - 3) Pembiasaan/pembudayaan perilaku hidup sehat.

Secara konkrit, kebijakan tersebut dirumuskan dalam program pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
  11. Alur produksi dan distribusi pelayanan makan bergizi adalah:
    - 1) Bumdes dan koperasi akan menyuplai bahan baku kepada unit layanan
    - 2) Unit layanan akan mengolah, pemorsian dan distribusi kepada sasaran bekerjasama dengan posyandu, TP PKK, puskesmas dan bidan

12. Isu strategis dan kebijakan kependudukan harus melihat kebijakan lansia karena meningkatnya jumlah lansia (65+) termasuk pada peningkatan umur harapan hidup yang harus disertai dengan esehatan dan kesejahteraan. Selain itu harus mengacu pada megatrend situasi demografi dan tantangan global yang memiliki pola serupa dengan fenomena kependudukan di Indonesia.
13. Tujuan pelayanan kesehatan lansia adalah agar Pra lansia dan lansia Indonesia mendapatkan akses dan kualitas pelayanan sehingga menjadi lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat. Dengan demikian untuk mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat, diperlukan adanya:
  - a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer
  - b. Pelatihan Tenaga Kesehatan Khusus Lansia
  - c. Pengembangan Infrastruktur Kesehatan
  - d. Penguatan Sistem Kesehatan Untuk Lansia Seperti Posbindu dan Jejaring Puskesmas
  - e. Pendekatan Berbasis Komunitas
14. Pembangunan IKN bertujuan mewujudkan target Indonesia menjadi negara maju sesuai dengan Visi Indonesia 2045. Diharapkan dengan pembangunan IKN tercapai pemerataan ekonomi, penduduk, dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
15. Dampak IKN terhadap persebaran dan mobilitas penduduk antara lain (1) perpindahan penduduk (dalam hal ini PNS) dan desentralisasi; (2) penyebaran pusat kegiatan ekonomi terutama pada kota penyangga di Kalimantan Timur dan perkembangan industri dan investasi; (3) perubahan pola mobilitas dengan perbaikan infrastruktur transportasi dan adanya arus komuter; (4) pengurangan kepadatan di Pulau Jawa; (5) urbanisasi dan pertambahan kota baru; (6) dampak social, ekonomi dan budaya di daerah penyangga; (7) IKN akan menjadi simbol sentralisasi baru yang memperkuat kohesi nasional; (8) mengurangi kesenjangan antara wilayah timur dan barat; (9) serta mempercepat pembangunan di luar Jawa.
16. Tujuan pembangunan kota berkelanjutan itu harus mencakup beberapa hal yaitu pembangunan integrasi risiko bencana, rencana tata ruang yang responsif, teknologi, inovasi, sistem drainase, pengelolaan air, restorasi ekosistem, partisipasi masyarakat, pendanaan, kebijakan, monitoring dan evaluasi.
17. Pembangunan kota yang berkelanjutan berbasis SDG 11 dan mitigasi bencana. Pendekatan Pembangunan yang mempertimbangkan risiko bencana dalam perencanaan dan pengembangan kota, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.
18. Upaya pemulihan di Kota Palu telah membawa kemajuan signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan risiko bencana. Dengan memfokuskan pada kolaborasi multi-pemangku kepentingan, Kota Palu menjadi model bagi daerah lain dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
19. Transformasi digital diperlukan di dunia pendidikan. Dunia saat ini telah memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang menuntut penguasaan teknologi sebagai kekuatan penggerak proses transformasi kehidupan dan kemajuan

- di suatu negara. Transformasi digital mendorong kolaborasi dan inovasi untuk menciptakan pendidikan dengan pembelajaran tanpa batas
20. Potensi era bonus demografi memberi peluang untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan membuka peluang lahirnya wirausaha terutama di sektor kreatif dan digital, namun tantangannya adalah lulusan perguruan tinggi yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri, rendahnya penciptaan lapangan kerja dan tingginya tenaga kerja sektor informal. Bonus demografi mencapai titik puncak tahun 2020 dan akan mulai melandai pada 2030 sehingga perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang mangkus dan sangkil. Postur pertumbuhan ekonomi masih perlu ditopang oleh konsumsi dan konstruksi (Pembentukan Modal Tetap Bruto /PMTB), dan perlu digenjot oleh industrialisasi.
  21. Inisiatif strategis perguruan tinggi mendukung SDGs adalah melalui integrasi SDGs dalam kurikulum, penguatan program inklusi digital, pendidikan keterampilan berbasis industri, dan peningkatan riset strategis.
  22. Inovasi Program Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penanggulangan permasalahan kependudukan, yaitu melalui pembukaan jurusan demografi/kependudukan, integrasi materi kependudukan kedalam berbagai bidang ilmu, KKNT kependudukan, pembentukan pusat kajian kependudukan, pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) kependudukan, dan kompetisi dengan tema kependudukan.

**SURAKARTA, 9 OKTOBER 2024**



**Dr. Nurjaeni, SSi, MSR  
(Ketua Tim Kerja Simposium Nasional  
Kependudukan Tahun 2024)**